

BAB I

PENDAHULUAN

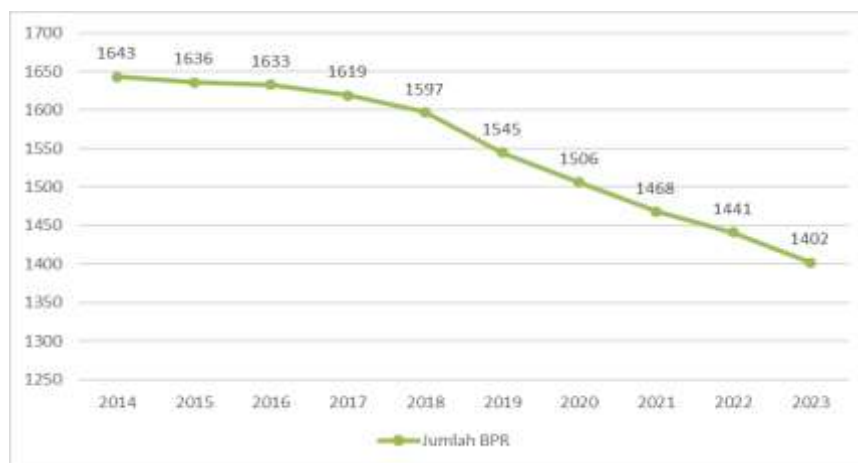
1.1 Latar Belakang

Stabilitas sektor perbankan merupakan fondasi utama dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. Faktor-faktor seperti profitabilitas, likuiditas, dan stabilitas keuangan sebelumnya secara positif mempengaruhi stabilitas perbankan, sementara faktor eksternal seperti pertumbuhan PDB juga memainkan peran yang signifikan (Tsegaye et al., 2024). Sektor perbankan yang stabil memfasilitasi investasi dan konsumsi (Korneev et al., 2023). Bank, termasuk BPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan tetapi juga memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui penyaluran dana kepada masyarakat dan pelaku usaha. Namun, risiko *financial distress* tetap menjadi ancaman serius, terutama dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Manajemen risiko yang efektif di bank, termasuk mengatasi risiko kredit dan likuiditas sangat penting untuk mencegah potensi kebangkrutan (Korneev et al., 2023; Toma & Roman, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan khususnya BPR menghadapi tantangan besar yang memengaruhi keberlanjutannya, termasuk peningkatan risiko kredit dan tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tercatat jumlah BPR yang bangkrut di Indonesia setiap tahunnya semakin bertambah. Banyaknya jumlah BPR yang bangkrut disebabkan oleh tata kelola bisnis bank yang tidak memadai. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan dalam tata kelola

perusahaan, seperti kurangnya akuntabilitas dan transparansi, secara langsung berkontribusi pada krisis perbankan (Appiah et al., 2023). Evaluasi dan pemantauan yang buruk serta mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang sudah mapan juga turut memperburuk ketidakstabilan keuangan (Dibra, 2016). Berikut gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa jumlah BPR di Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami tren yang semakin menurun.

Gambar 1.1
Jumlah BPR Tahun 2014-2023



Sumber: OJK, data diolah

Fenomena penurunan jumlah BPR di Indonesia menjadi perhatian utama. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah BPR terus mengalami penurunan dari 1.643 unit pada tahun 2014 menjadi hanya 1.402 unit pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kredit bermasalah (*Non-Performing Loans/NPL*), persaingan ketat dengan bank umum dan *fintech*, serta ketidakmampuan sebagian BPR dalam memenuhi standar permodalan yang ditetapkan oleh regulator. Banyak bank berjuang untuk memenuhi persyaratan modal, yang dapat menyebabkan peningkatan perilaku pengambilan risiko karena mereka berusaha mempertahankan profitabilitas (Allen et al., 2011).

Di China, rasio NPL yang tinggi telah dikaitkan dengan praktik pinjaman yang lebih berisiko dan memperburuk ketidakstabilan keuangan (D. Zhang et al., 2016). NPL secara signifikan mengurangi efisiensi bank, yang menyebabkan operasi dan profitabilitas menurun (Takahashi & Vasconcelos, 2024). Selain itu, pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ini dengan menyebabkan peningkatan NPL di sektor BPR, sehingga banyak BPR mengalami kesulitan likuiditas bahkan terancam kebangkrutan.

Financial distress tidak hanya berdampak pada individu atau perusahaan yang terlibat, tetapi juga memiliki efek domino terhadap sistem keuangan secara keseluruhan, yang dapat memengaruhi kestabilan ekonomi nasional. Salah satu contoh nyata adalah krisis ekonomi yang terjadi selama pandemi COVID-19, yang menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) dan menurunnya daya beli masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada peningkatan NPL di bank-bank konvensional dan regional di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa NPL meningkat selama pandemi dibandingkan dengan periode sebelumnya (Aldi Akbar et al., 2021; Fakhrunnas et al., 2022; Hardiyanti & Aziz, 2021). Fakhrunnas et al. (2022) menambahkan bahwa hubungan asimetris antara variabel inflasi dan NPL ditemukan baik sebelum maupun selama pandemi, dengan dampak yang lebih menonjol pada bank syariah sebelum pandemi. Peningkatan NPL ini mempengaruhi likuiditas bank, karena banyak debitur mengalami kesulitan memenuhi kewajiban mereka (Christanto & Susanto, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Marwah et al. (2022) mengatakan bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19 menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara drastis, terutama mempengaruhi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan menyebabkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia terkoreksi hingga -2,19% (Suardi & Nugroho, 2024). Sektor rumah tangga menjadi salah satu sektor yang paling terdampak, dengan penurunan signifikan dalam konsumsi dan investasi (Susilawati et al., 2020).

Fenomena lain yang mencolok adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada sektor perbankan. Inflasi yang meningkat tajam pada tahun 2022 telah menjadi salah satu pemicu utama tekanan ekonomi di negara-negara berkembang. Inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi daya beli dan menghalangi investasi baik domestik maupun asing (Samimi & Kenari, 2015; Yuliawan et al., 2024). Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, di mana peningkatan inflasi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan hingga titik tertentu (Siarni-Namini & Hudson, 2019). Inflasi yang tinggi dapat mengganggu kinerja sektor keuangan, termasuk pengembangan sektor perbankan dan aktivitas pasar ekuitas. Menurut Ghosh (2023), hubungan ini bersifat non-linear, di mana dampak marginal inflasi pada aktivitas pinjaman bank dan pengembangan pasar saham menurun dengan cepat seiring meningkatnya inflasi. Kebijakan moneter yang efektif sangat penting untuk menjaga inflasi dalam batas yang dapat dikelola, yang pada gilirannya dapat

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ibarra & Trupkin, 2016; Yuliawan et al., 2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Indonesia mencapai 5,51% pada akhir 2022, yang merupakan salah satu angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan inflasi ini disebabkan oleh peningkatan harga yang tercermin dari naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Kondisi ini juga diperburuk oleh kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan untuk menekan inflasi, yang pada akhirnya meningkatkan beban bunga bagi debitur dan memengaruhi likuiditas BPR. Dalam kondisi ini, banyak BPR menghadapi risiko kebangkrutan akibat tekanan keuangan yang semakin berat. Hal itu juga didukung oleh penelitian Rachmawati dan Ningsih (2018) yang menyatakan bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap potensi kebangkrutan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, analisis rasio keuangan menjadi alat penting untuk menilai risiko kebangkrutan. Rasio keuangan, seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loan* (NPL), *Return on Assets* (ROA), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), telah lama digunakan sebagai indikator kesehatan keuangan BPR. Mulyawan (2015) menekankan bahwa rasio likuiditas dan *leverage* adalah prediktor dominan kebangkrutan, menyoroti pentingnya mereka dalam menilai risiko kebangkrutan. Namun, dalam konteks yang lebih luas, variabel eksternal seperti dinamika inflasi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas sektor perbankan. Inflasi yang tinggi, suku bunga yang fluktuatif, dan perlambatan

pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk kondisi keuangan bank, sehingga menambah kompleksitas dalam prediksi risiko kebangkrutan.

Ketidakpastian inflasi dapat mengurangi posisi cadangan likuid bank, bahkan ketika investasi tumbuh dengan baik (Abaidoo & Agyapong, 2022). Fluktuasi ekonomi yang dinamis, baik naik, turun, atau acak, dapat mempengaruhi stabilitas jaringan perbankan (Gao & Fan, 2020). Tingkat suku bunga yang tinggi dan nilai tukar yang tidak stabil memiliki dampak negatif signifikan terhadap stabilitas industri perbankan (Enebeli-Uzor, 2024). Stabilitas nilai tukar melalui intervensi pemerintah dapat membantu bank melindungi nilai aset dan kredit dari volatilitas (Enebeli-Uzor, 2024). Penurunan harga aset dapat memicu ketidakstabilan keuangan, yang dapat menyebabkan krisis perbankan (Peter, 2009). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang moderat adalah pendorong utama stabilitas perbankan (Enebeli-Uzor, 2024).

Salah satu fenomena yang relevan adalah kasus beberapa bank besar di Indonesia yang menghadapi tekanan berat selama pandemi. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), misalnya, mencatatkan peningkatan signifikan dalam rasio NPL pada tahun 2021 yaitu sebesar 3%, meskipun berhasil melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas keuangannya (Nasution et al., 2023). Meskipun ada peningkatan NPL, BRI tetap menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan dapat dikategorikan dalam kondisi yang sehat berdasarkan penilaian kesehatan keuangan bank (Sjahrifa et al., 2018). NPL memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit di BRI. Setiap peningkatan NPL sebesar 1% dapat mempengaruhi penurunan penyaluran kredit (Nurdiansyah, 2021). Fenomena ini menunjukkan

bahwa meskipun bank memiliki rasio keuangan yang sehat, faktor eksternal seperti kondisi inflasi tetap dapat memberikan tekanan yang signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan intergratif yang tidak hanya berfokus pada analisis rasio keuangan tetapi juga mempertimbangkan variabel inflasi sebagai faktor moderasi. Penelitian menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel ekonomi makro, termasuk inflasi, dan tingkat kebangkrutan. Misalnya, kenaikan inflasi dapat bertepatan dengan meningkatnya hutang perusahaan, yang dapat menyebabkan tingkat kebangkrutan yang lebih tinggi (Moravec, 2013). Inflasi juga dapat mempengaruhi kebangkrutan karena tingkat inflasi rendah yang tak terduga meningkatkan kewajiban riil, meningkatkan risiko gagal bayar bagi perusahaan (Kang & Pflueger, 2015).

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan inflasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara rasio keuangan dan *financial distress* pada BPR. Selama ini, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada analisis rasio keuangan internal tanpa mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang dinamis, khususnya inflasi. Padahal, dalam praktiknya, inflasi memiliki dampak signifikan terhadap daya beli nasabah, risiko kredit, beban operasional, dan likuiditas bank. Dengan memasukkan inflasi ke dalam model analisis sebagai faktor moderasi, penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memprediksi risiko kebangkrutan. Model ini memungkinkan penilaian lebih realistis terhadap ketahanan keuangan BPR dalam menghadapi tekanan eksternal ekonomi, serta memberikan kontribusi empiris dalam penyusunan strategi mitigasi risiko berbasis kondisi makro.

Penelitian Amarasena dan Peiris (2021) menegaskan bahwa inflasi yang tinggi dapat mengurangi pendapatan bunga dan meningkatkan beban bunga yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan bersih bank. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Awdeh et al. (2024) yang menyatakan bahwa inflasi yang tinggi dapat memperburuk stabilitas keuangan bank dan meningkatkan risiko kredit. Studi menunjukkan bahwa menggabungkan variabel inflasi dengan rasio keuangan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan *financial distress* (Acosta-González et al., 2019). Misalnya, model yang menggabungkan variabel inflasi dan rasio keuangan menunjukkan tingkat keberhasilan prediksi yang tinggi, baik untuk prediksi dalam sampel maupun luar sampel (Acosta-González et al., 2019). Namun, studi yang mengintegrasikan kedua aspek ini masih sangat terbatas, sehingga menciptakan kesenjangan literatur yang perlu diisi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mengevaluasi pengaruh rasio keuangan terhadap *financial distress*, serta peran inflasi sebagai moderasi dalam hubungan tersebut.

Pemilihan topik ini juga didasarkan pada relevansinya dengan kondisi BPR di Indonesia selama periode 2019–2023. Dalam periode ini, BPR di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari peningkatan kredit bermasalah hingga penurunan profitabilitas akibat perlambatan ekonomi global yang menyebabkan banyak BPR mengalami kebangkrutan. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) memiliki hubungan positif dengan kemungkinan krisis perbankan (Zakaria & Musdholifah, 2021). Oleh karena itu, analisis yang komprehensif diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang risiko kebangkrutan di sektor ini. Penelitian ini

berfokus pada BPR di Provinsi Jawa Timur, yang datanya dapat diakses melalui laporan tahunan resmi dan publikasi lainnya. Gambar 1.2 merupakan sebaran jumlah BPR tiap Provinsi di Indonesia, dimana penulis memilih objek penelitian di Provinsi Jawa Timur karena merupakan provinsi dengan jumlah BPR terbanyak yang didasarkan pada data OJK yang menunjukkan bahwa sebanyak 70,1% BPR tersebar di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1.2
Sebaran BPR Berdasarkan Jumlah dan Provinsi



Sumber: OJK, data diolah

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang *financial distress* dengan pendekatan integratif yang menggabungkan analisis rasio keuangan dan variabel inflasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen bank dan regulator keuangan dalam merumuskan kebijakan mitigasi risiko. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam menilai kesehatan keuangan bank sebagai dasar

pengambilan keputusan investasi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang mendalam dan strategis bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan regulator di sektor perbankan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang mengkaji risiko kebangkrutan di sektor-sektor lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan mengkaji beberapa pertanyaan penting:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *financial distress*?
2. Apakah *Non-Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap *financial distress*?
3. Apakah BOPO berpengaruh terhadap *financial distress*?
4. Apakah *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *financial distress*?
5. Apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap *financial distress*?
6. Apakah inflasi mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loan* (NPL), BOPO, *Return on Assets* (ROA), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *financial distress*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *financial distress*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap *financial distress*.

3. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap *financial distress*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap *financial distress*.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *financial distress*.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loan* (NPL), BOPO, *Return on Assets* (ROA), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *financial distress* yang dimoderasi oleh inflasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kebangkrutan dengan memasukkan inflasi sebagai variabel moderasi, memperkaya literatur tentang *financial distress* dalam konteks perbankan.
 - b. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana rasio keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* memengaruhi risiko kebangkrutan, terutama dalam kondisi ekonomi tertentu.
 - c. Penelitian ini menyoroti pentingnya memasukkan variabel inflasi dalam model *financial distress* untuk memberikan hasil yang lebih relevan dan akurat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang berguna bagi manajemen bank untuk memahami faktor-faktor keuangan dan inflasi yang memengaruhi risiko kebangkrutan, sehingga dapat mengambil langkah preventif.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh investor dan kreditor untuk menilai risiko kebangkrutan bank berdasarkan analisis rasio keuangan dan indikator inflasi.
- c. Memberikan masukan bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan dengan memantau faktor-faktor risiko yang diidentifikasi dalam penelitian.

3. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini menjadi acuan bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait *financial distress*, terutama dengan pendekatan integrasi antara variabel keuangan dan inflasi.
- b. Menyediakan model *financial distress* yang dapat diuji ulang atau dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain di sektor keuangan atau sektor lainnya.
- c. Memberikan bahan ajar atau studi kasus dalam pembelajaran mengenai analisis kebangkrutan dan pengaruh faktor inflasi dalam konteks perbankan.